

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANDUNG

Melyn Ajeng Hartini¹, Verlita Keyzia Putri², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

Universitas Negeri Surabaya

e-mail: 25040674236@unesa.mhs.ac.id¹, 25040674258@unesa.mhs.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara mempelajari literatur melalui berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan-peraturan serta jurnal ilmiah yang terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH berperan cukup baik dalam membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, serta memastikan mereka tetap bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti akurasi data penerima bantuan, kualitas pengawasan, risiko ketergantungan, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PKH dapat dianggap cukup efektif sebagai program perlindungan sosial, tetapi masih perlu diperkuat agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Kota Bandung.

Abstract – This study aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) implementation in alleviating poverty in Bandung City. This study employed a qualitative approach, examining various official government documents, data from the Central Bureau of Statistics (BPS), regulations, and related scientific journals. The analysis employed George C. Edward III's policy implementation theory, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that PKH plays a significant role in helping poor families reduce their daily expenses and ensuring access to education, healthcare, and social services. However, several obstacles remain in its implementation, such as the accuracy of recipient data, the quality of oversight, the risk of dependency, and inadequate coordination between institutions. Therefore, PKH can be considered quite effective as a social protection program, but it still needs to be strengthened to ensure more sustainable poverty alleviation efforts in Bandung.

Keywords: Program Keluarga Harapan (PKH), Policy Implementation, Poverty, Bandung City.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi tantangan multidimensi bagi pembangunan di Indonesia, yang mencakup keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kerangka pembangunan global, penghapusan kemiskinan menjadi tujuan utama Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 1: No Poverty. Penanggulangan kemiskinan merupakan tantangan penting dalam pengembangan sektor sosial dan ekonomi di Indonesia. Berbagai program sosial telah dibuat untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial yang memiliki syarat tertentu. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan uang tunai untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, dan kesehatan.

Kota Bandung, sebagai salah satu pusat perkotaan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, masih menghadapi realitas kemiskinan yang menantang di tengah

pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Bandung mencapai 3,87% atau sekitar 101.100 jiwa. Angka ini menegaskan urgensi untuk mempelajari dan mengevaluasi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) guna memastikan program tersebut benar-benar berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun PKH telah berjalan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti ketidakteraturan data penerima bantuan, risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan, hingga keterbatasan koordinasi antarlembaga. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan keberhasilan program dengan realitas efektivitasnya di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna mengukur dampak PKH terhadap akses layanan dasar dan perubahan manajemen pengeluaran keluarga, serta mengidentifikasi hambatan implementasi melalui kacamata teori kebijakan publik. Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat keberhasilan program serta rumusan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk memperkuat efektivitas PKH di masa mendatang.

METODELOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library search*). Studi literatur adalah cara melakukan penelitian yang mencari dan menganalisis berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diambil dari berbagai publikasi resmi seperti laporan Kementerian Sosial, laporan statistik dari Badan Pusat Statistik, serta jurnal ilmiah yang membahas kebijakan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan dan memperjelas informasi terkait penerapan PKH dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di kota Bandung. Analisis data dilakukan dengan mengkaji beberapa sumber literatur, kemudian mengaitkannya dengan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan ini, bertujuan untuk mempelajari cara pelaksanaan PKH dilakukan serta faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran program tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi PKH berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian PKH merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial yang dibuat untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok mereka sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup bagi keluarga yang menerima bantuan. Dalam konteks Kota Bandung program ini masih penting karena masalah kemiskinan belum tuntas teratasi. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung menunjukkan bahwa pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Bandung adalah 3,87% atau sekitar 101.100 jiwa. Angka ini menunjukkan meskipun Bandung merupakan kota besar dengan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi yang rentan dan membutuhkan bantuan dari kebijakan sosial yang diberikan pemerintah. Dalam situasi tersebut PKH menjadi penting karena tidak hanya memberikan bantuan tunai tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan keluarga miskin tetap bisa mengakses

pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Jika dilihat melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang digunakan. Keempat aspek ini membentuk kerangka yang tepat untuk memahami pelaksanaan PKH, karena keberhasilan program tidak hanya tergantung pada adanya bantuan tetapi juga pada cara kebijakan tersebut diterapkan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil kajian berbagai jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang membahas implementasi serta dampak PKH. Berdasarkan berbagai literatur, PKH dipahami sebagai kebijakan yang berperan dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin serta menanggulangi kemiskinan secara bertahap. Dari sudut pandang komunikasi, berbagai literatur menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang jelas dan berkelanjutan merupakan salah satu syarat penting agar program tersebut bisa berjalan secara efektif.

Dalam PKH, komunikasi tidak hanya tentang pemerintah pusat memberi informasi ke pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan proses sosialisasi dan bimbingan kepada keluarga yang menerima manfaat. Informasi tentang tujuan dari program, syarat untuk menjadi peserta, hak yang diperoleh oleh penerima, serta kewajiban yang harus dipenuhi perlu diberikan dengan jelas agar program tidak hanya dianggap sebagai pemberian bantuan tunai semata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat membantu penerima manfaat lebih memahami peran PKH sebagai bantuan sosial yang memenuhi syarat, dan bertujuan untuk mendukung pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara lebih luas. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan salah paham, penggunaan bantuan yang tidak tepat, serta timbulnya rasa cemburu sosial di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan faktor dasar dalam membangun efektivitas implementasi program. Dalam konteks Kota Bandung, komunikasi menjadi semakin penting karena masyarakat perkotaan memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Keluarga yang mendapatkan manfaat seringkali tidak memiliki pengetahuan yang sama mengenai cara kerja program serta maksud dari program tersebut. Oleh karena itu, peran pendamping sosial sangat penting karena menjadi penyambung antara kebijakan dan masyarakat. Melalui pendampingan, keluarga penerima manfaat dapat memperoleh penjelasan yang lebih jelas mengenai penggunaan bantuan, kewajiban sebagai peserta, serta pentingnya memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan yang menunjang kualitas hidup keluarga. Berbagai literatur menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara persuasif dan berkelanjutan cenderung lebih efektif dibandingkan komunikasi yang hanya bersifat formal.

Dengan demikian, keberhasilan program PKH tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam menjelaskan tujuan program kepada masyarakat. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah sumber daya. Dalam menerapkan kebijakan, sumber daya yang dibutuhkan mencakup tenaga manusia, dana, data, serta fasilitas pendukung lainnya yang memudahkan program tersebut dijalankan dengan baik. Dalam berbagai penelitian mengenai PKH, salah satu faktor yang paling penting adalah adanya pendampingan sosial. Pendamping memiliki peran yang sangat penting karena mereka secara langsung membantu penerima manfaat memahami program, mengawasi pemenuhan komitmen, serta berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dengan institusi birokrasi yang mengeksekusi program tersebut. Literatur juga menunjukkan bahwa kualitas kerja pendamping sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PKH, karena pendamping tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator sosial yang

membantu perubahan perilaku keluarga penerima manfaat. Jika jumlah pendamping tidak sesuai dengan tugas yang harus dikerjakan atau kemampuan mereka masih terbatas, maka pelaksanaan program bisa menjadi tidak maksimal. Selain itu, keakuratan data penerima bantuan juga merupakan faktor yang sangat penting. Beberapa literatur menekankan bahwa salah satu tantangan klasik dalam pelaksanaan bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh data yang belum diperbarui. Dalam pelaksanaan PKH, masalah data dapat menyebabkan kesalahan inklusi atau eksklusi, yaitu ketika rumah tangga yang sebenarnya layak menerima bantuan tidak tercakup atau sebaliknya rumah tangga yang sudah tidak layak lagi masih tetap menerima bantuan. Masalah tersebut penting karena ketepatan data penerima merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Artinya, berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program PKH tidak hanya tergantung pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada ketepatan data penerima manfaat. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka tujuan pengentasan kemiskinan akan sulit tercapai secara maksimal.

Berdasarkan beberapa penelitian, PKH terbukti memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat dapat digunakan untuk membiayai sekolah anak, perlengkapan belajar, transportasi, serta kebutuhan kesehatan dasar, sehingga pengeluaran keluarga menjadi lebih ringan. Dalam banyak penelitian, dampak ini dianggap penting karena keluarga miskin sering kali kesulitan mempertahankan pengeluaran untuk kebutuhan dasar ketika pendapatan mereka terbatas atau tidak stabil. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tekanan ekonomi rumah tangga dapat berkurang, sehingga keluarga memiliki ruang yang lebih luas untuk memprioritaskan pendidikan anak dan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan tujuan penelitian, hasil dari pengkajian literatur menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta membantu keluarga dalam mengatur pengeluaran rumah tangga secara lebih terarah.

Namun, berbagai sumber juga menunjukkan bahwa dampak program PKH terhadap pengeluaran rumah tangga tidak selalu sama bagi setiap keluarga yang menerima manfaat. Perbedaan kondisi ekonomi keluarga, banyaknya anggota yang ditanggung, tingkat pendidikan orang tua, dan cara pengeluaran rumah tangga bisa memengaruhi bagaimana bantuan tersebut digunakan. Di sebagian keluarga bantuan PKH benar-benar digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan, namun di keluarga lain bantuan tersebut lebih banyak digunakan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bukan hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan keluarga dalam menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, bantuan sosial tetap diperlukan agar manfaat bantuan tidak hanya mengatasi kebutuhan sementara, tetapi juga memperkuat kualitas hidup keluarga secara lebih lanjut dan berkelanjutan.

Aspek ketiga adalah disposisi. Dalam teori George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan komitmen, kemauan, dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan PKH, disposisi pelaksana sangat penting karena keberhasilan program bergantung pada seberapa baik pendamping sosial dan pihak terkait memahami tujuan program serta melaksanakannya secara konsisten. Jika pelaksana memiliki komitmen yang kuat, maka proses bimbingan, pengawasan, dan pembinaan bisa berlangsung lebih baik. Jika hanya fokus pada penyaluran bantuan secara administratif, tujuan program yang mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup bagi keluarga penerima bantuan sulit tercapai secara optimal. Disposisi pelaksana juga

dapat dilihat dari upaya mereka dalam mendorong keluarga penerima manfaat agar tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan. Dalam berbagai pembicaraan tentang bantuan sosial, ketergantungan orang yang menerima bantuan sering kali menjadi isu yang mencuri perhatian. Meskipun begitu, ketergantungan tersebut tidak hanya muncul karena adanya bantuan, tetapi juga karena adanya keterbatasan kesempatan ekonomi dan tingkat dukungan kebijakan pemberdayaan yang masih kurang memadai. Oleh karena itu, pelaksana program harus berkomitmen untuk menjadikan PKH sebagai langkah awal menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih mandiri. Dengan demikian, keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari adanya bantuan yang diberikan, tetapi juga dari seberapa besar program tersebut mampu mengubah sikap, prioritas, dan kualitas hidup keluarga yang menerima manfaat.

Aspek keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berhubungan dengan cara pembagian pekerjaan, langkah-langkah yang diambil dalam bekerja, serta cara berkomunikasi dan bekerja sama antar instansi yang terlibat dalam menjalankan program tersebut. Dalam pelaksanaan PKH, struktur birokrasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas sosial, pendamping sosial, serta lembaga pendidikan dan kesehatan yang terkait penuh dengan pemenuhan komitmen penerima manfaat. Banyak sumber menyatakan bahwa sebuah program akan lebih berhasil jika struktur birokrasi terorganisir dengan jelas, proses koordinasi antara pihak tidak rumit, dan setiap orang tahu tegas serta peran yang harus mereka lakukan. Koordinasi yang buruk bisa menyebabkan data tidak diperbarui dengan cepat, membuat penyelesaian masalah di lapangan menjadi lebih lambat, dan mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Di Kota Bandung, kerja sama antar organisasi sangat penting karena kemiskinan dipertanian memiliki ciri yang terus berubah dan tidak stabil. Masalah kemiskinan di kota tidak hanya disebabkan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga karena biaya hidup yang tinggi, pekerjaan yang tidak stabil, serta berbagai masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk menggelar PKH dengan baik, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dukungan dari berbagai lembaga terkait agar bantuan yang diberikan benar benar bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang kurang mampu. Banyak sumber tulisan juga menunjukkan bahwa kurangnya kerja sama antar instansi masih menjadi salah satu hal yang menghambat pelaksanaan PKH. Oleh karena itu, memperkuat struktur birokrasi dan kerja sama antar pelaksana masih sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam menerapkan program tersebut.

Secara keseluruhan, hasil dari peninjauan literatur menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang cukup penting dalam mengatasi masalah kemiskinan, khususnya dalam membantu keluarga yang miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka yang dan mengurangi beban pengeluaran dirumah tangga. Program ini juga membantu memastikan keluarga penerima manfaat tetap bisa mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup mereka. Meskipun begitu, keberhasilan program PKH masih belum mencapai tingkat yang maksimal karena masih ada beberapa kendala, seperti ketepatan dalam menjangkau penerima, pembaruan data yang kurang tepat waktu, kualitas bantuan yang diberikan, risiko terjadinya ketergantungan terhadap bantuan, serta koordinasi dalam birokrasi yang belum merata. Oleh karena itu, program PKH di Kota Bandung bisa dikatakan cukup baik dalam memberikan perlindungan sosial namun masih perlu diperbaiki dalam penerapannya agar bisa lebih membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Bandung. Sebagai instrumen bantuan sosial bersyarat, PKH tidak hanya berfungsi untuk meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga secara efektif menjaga akses keluarga penerima manfaat terhadap layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, demi meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas program ini di lapangan sangat ditentukan oleh sinergi antara komunikasi yang jelas kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia dan data yang mumpuni, disposisi atau komitmen kuat dari para pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung koordinasi lintas instansi secara solid.

Namun demikian, implementasi PKH di Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius yang menyebabkan program belum berjalan secara maksimal, seperti adanya ketidakakuratan data penerima bantuan yang memicu kesalahan sasaran, kualitas pendampingan yang belum merata, serta risiko munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Oleh karena itu, PKH dapat dianggap cukup berhasil sebagai alat perlindungan sosial yang membantu mengurangi kesulitan hidup warga miskin, namun tetap memerlukan penguatan signifikan melalui pembaruan data yang lebih responsif serta sinkronisasi birokrasi agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan menuju tercapainya kemandirian keluarga penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina, M. G. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2), 70-80.
- Asyavira, A. A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(06), 15-22.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2024). *Kota Bandung Dalam Angka 2024*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Darajat, A. H. (2021). Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar). *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 10(1), 8-14.
- Fobia, M., & N. (2025). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(12), 11-20.
- Karimah, S. (2023). Pengaruh Program Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wringinagung Kabupaten Pekalongan. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 304-313.
- Lubis, E. F., & E. Z. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(2), 88-99.
- Mahmudah, R., & A. B. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Kebijakan Publik*, 411-422.
- Melati, T. (2023). Evaluasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Inklusi Sosial: Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal UDA*, 31(3), 257-267.
- Safitri, N., & D. S. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)*, 5(2), 1-7.
- Sermumes, N. N. (2025). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Perlindungan Sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Armnu Distrik Andey Kabupaten Biak Numfor. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 5(1), 52-58.

Suriani, N., & D. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6268–6276.